



PENETAPAN

Nomor: 195/Pdt.P/2021/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Muslimin bin Aripin, Umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Maemunah binti Amaq Sajudin, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 195/Pdt.P/2021/PA.Sel tanggal 02 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada Tahun 1995 di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sajudin, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Mukti Ali dan Muh. Rencana dengan maskawin Seperangkat pakaian Sholat dan uang Rp 200. (dua ratus rupiah).- tunai;
2. Bahwa Pemohon I adalah anak dari pasangan suami istri (ilam) dengan (Nep) dan Pemohon II anak dari pasangan suami istri (Amaq Rohaniah) dengan (Inaq Sopiya);

Hal. 1 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 4 orang anak bernama : 1. Irvan Jayadi, 2. Suprianto, 3. Eka Matra, 4. Ropan Ijani
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula, Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu/miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh an Kepala Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabuapten Lombok Timur nomor: 984/PL/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020 dan telah dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muslimin bin Aripin) dengan Pemohon II (Maemunah binti Amaq Sajudin) yang dilaksanakan pada Tahun 1995 di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 2 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan pemohon dari biaya perkara;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 5203023112640031 tanggal 05-03-2020 diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 5203024107700816 tanggal 13-02-2020 diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai.

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II menghadapkan saksi-saksi, sebagai berikut:

Saksi I **M. Nazri bin Abdul Gani**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kuang derek, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Tahun 1995 di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sajudin, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Mukti Ali dan Muh. Rencana dengan maskawin Seperangkat pakaian Sholat dan uang Rp 200. (dua ratus rupiah).- tunai;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin

Hal. 3 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;

- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Irvan Jayadi, 2. Suprianto, 3. Eka Matra, 4. Ropan Ijani;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Saksi II **Saifullah bin H Bahrudin**, umur 63tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kuang derek, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Tahun 1995 di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sajudin, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Mukti Ali dan Muh. Rencana dengan maskawin Seperangkat pakaian Sholat dan uang Rp 200. (dua ratus rupiah).- tunai;
- saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan, yang melarang mereka untuk menikah;
- bahwa saksi tahu tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Irvan Jayadi, 2. Suprianto, 3. Eka Matra, 4. Ropan Ijani;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat dan perkara ini diajukan untuk memperoleh keabsahan pernikahannya secara hukum;

Hal. 4 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 4 Ayat (1) *juncto* Pasal 49 dan Penjelasannya, dan dengan didukung bukti P.1 dan P.2 maka Pengadilan Agama Selong berwenang memeriksa serta memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah sebagai bukti keabsahan status pernikahan mereka, permohonan mana didasari dalil bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan, telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta tidak terdapat larangan perkawinan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Agama Islam pada Tahun 1995 di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Amaq Sajudin, dan orang-orang yang hadir pada saat itu sebagai saksi antara lain adalah H. Mukti Ali dan Muh. Rencana dengan maskawin Seperangkat pakaian Sholat dan uang Rp 200. (dua ratus rupiah).- tunai;

Hal. 5 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Irvan Jayadi, 2. Suprianto, 3. Eka Matra, 4. Ropan Ijani;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara aquo, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut telah tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Hal. 6 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan dengan memperhatikan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Tuhfah* :133 dan *l'anatutthalibin IV* :254

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ... وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

"Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh tentang peristiwa pernikahan(-nya)... Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ",

maka permohonan tersebut terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi pencatatan pernikahan, sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/731 /HK.05/II/2021, tanggal 02 Maret 2021, Maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ini dan selanjutnya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp. 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Memerhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Muslimin bin Aripin) dengan Pemohon II (Maemunah binti Amaq Sajudin) yang dilaksanakan pada

Hal. 7 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1995 di Kuang derek, RT.001. Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selong tahun : 2021, Nomor : DIPA- 005.04.2.309111/2021, tanggal 23 November 2020 sebesar Rp.210.000,00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1442 Hijriaholeh kami **Ahmad Rifa'I, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar, S.H.** dan **Firman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Multazam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Abubakar, S.H.

ttd

Ahmad Rifa'I, S.Ag., M.H.I.

ttd

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Multazam, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : RP. 210 000,00

(Dua Ratus sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Selong
Panitera,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Penetapan. No. 195 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 Penetapan. No. 19 /Pdt.P/2021/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)